**ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik**
ISSN: 2808-6694 (Online);2808-7291 (Print)
Jurnal Homepage https://etnik.rifainstitute.com

# Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia

**Imam Setiawan[1], Jamaliah[2]**

Universitas Tanjungpura

**Informasi Artikel**

*Histori Artikel:*
*Submit* ***10 Mei 2023***
*Accepted* ***15 Mei 2023***
*Published* ***20 Mei 2023***

***Email Author:***
**B1011211154@student.untan.ac.id**
**Jamaliah.fekon@gmail.com**

*ABSTRACT*

*Poverty is a social problem that is always faced by the Indonesian people. This problem is always associated with the economy through the income earned. Poverty is a serious problem because it will affect everyday life, so it is important to overcome the problem of poverty. The purpose of this research is to find out the process of the Indonesian state in alleviating poverty. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of this study are to determine the development of poverty from the New Order to the era of President Joko Widodo. This process is carried out through policies that are in accordance with the 1945 Constitution and Pancasila. In implementing policies, always consider the impact in the future. Public policy is also one way for the Government to find out the development of the poverty rate in Indonesia. With this policy, it is hoped that the poverty rate will decrease. This economic problem is also closely related to the educational background of the community. Low education, for example, is one component of poverty. This is also the focus of the government to provide good programs for the progress of Indonesia*

**Keywords –** *Poverty, Social Problems, Education*

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu dihapai oleh Indonesia. Masalah ini selalu dikaitkan dengan perekonomian melalui pendapatan yang diperoleh. Kemiskinan merupakan masalah serius karena akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, sehingga pentingnya mengatasi masalah kemiskinan. Tujuan adanya penelitian ini supaya mengetahui proses negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil

penelitian ini yaitu mengetahui perkembangan kemiskinan dari orde baru hingga era Presiden Joko Widodo. Proses ini dengan melalui kebijakan yang sudah sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam melakukan kebijakan, selalu mempertimbangkan dampak ke depannya. Kebijakan public juga menjadi salah satu cara Pemerintah untuk mengetahui perkembangan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini harapannya angka kemiskinan akan menurun. Permasalahan ekonomi ini erat kaitannya juga dengan latar belakang pendidikan masyarakat. Pendidikan yang rendah contohnya sebagai salah satu komponen di dalam kemiskinan. Hal ini juga menjadi fokus pemerintah untuk memberikan program yang baik untuk kemajuan Indonesia

**Kata Kunci –** Kemiskinan, Masalah Sosial, Pendidikan

## PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan ekonomi menjadi topik strategis dalam pelaksanaan suatu negara karena terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki arti penting terkait isu kemiskinan. Sepanjang sejarah manusia, kemiskinan selalu menjadi isu klasik yang rumit dan tampaknya selalu aktual di seluruh dunia. Meskipun kemiskinan seringkali dikaitkan dengan pendapatan yang rendah, namun masalah ini melibatkan banyak aspek lain seperti kesehatan dan pendidikan. Menurut PBB, kemiskinan adalah kondisi di mana individu tidak memiliki pilihan atau kesempatan untuk mengembangkan kemampuan hidup mereka. Dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan terus-menerus dalam kesejahteraan hidup. Kurangnya pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan teknologi adalah hambatan bagi sumber daya manusia dan merupakan salah satu penyebab kemiskinan, selain hambatan struktural, institusional, dan sosial-budaya. Mengabaikan masalah manusia dalam upaya mengatasi kemiskinan diyakini sebagai penyebab kegagalan. Oleh karena itu, pembangunan manusia merupakan indikator penting bagi kemajuan suatu negara, tidak hanya diukur dari Pendapatan Domestik Bruto, melainkan juga dari harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya. Pendidikan adalah modal dasar untuk mengembangkan sumber daya manusia, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup Indeks Pengetahuan sebagai salah satu indeks penting. Dengan pendidikan yang memadai, pembangunan nasional diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Sustainable Development Goals (SDGs) yang melanjutkan Millenium Development Goals (MDGs) memiliki lima pilar yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan, dan bertujuan untuk mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 yaitu mengakhiri kemiskinan, mencapai keseimbangan ekonomi sosial.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "negara harus menjaga fakir miskin dan anak terlantar," Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menurunkan jumlah masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak zaman orde lama hingga saat ini. Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 28,01 juta jiwa atau sekitar 10,86 persen dari total jumlah penduduk

sekitar 250 juta jiwa. Data BPS juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak terdapat di wilayah pedesaan daripada perkotaan. Pada bulan Maret 2016, terjadi kenaikan sebesar 0,02 persen menjadi 14,11 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015. Oleh karena itu, angka kemiskinan di Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia karena terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, dimulai dari masa orde lama hingga masa pemerintahan saat ini.

## METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2016) memaknai adalah jenis penelitian yang dilakukan secara ilmiah lebih bersifat deskriptif dan menekankan pada proses produk dengan melakukan analisis secara induktif. Penelitian kualitatif kekuatannya bukan pada data dan analisis statistik, namun pada deskripsi. Selain itu, penelitian kualitatif juga menjelaskan fenomena untuk menangkap makna secara mendalam (Sugiyono, 2016).

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan desktiptif. Pendekatan deskriptif merupakan pengumpulan data berdasarkan atas faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap obyek penelitian, lalu menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari perannya (Sugiyono, 2016). Alasan peneliti menggunakan studi pendekatan deskriptif adalah pendekatan deskriptif menitikberatkan pada realita dan fakta dari setiap individu, sehingga dari pengalaman inilah studi deskriptif menggambarkan makna dari pengalaman langsung individu tentang konsep atau fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kemiskinan

Chambers menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu dengan lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan, 2) kelemahan, 3) kerentanan terhadap keadaan darurat, 4) ketergantungan, dan 5) isolasi geografis dan sosiologis. Teori ini menunjukkan bahwa hidup dalam kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan uang dan berpenghasilan rendah, tetapi juga mencakup hal-hal lain seperti kesehatan yang buruk, pendidikan yang buruk, perlakuan hukum yang tidak adil, kerentanan terhadap ancaman kriminal, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan dan ketidakmampuan untuk memilih jalan hidup seseorang. Klasifikasi kemiskinan adalah sebagai berikut :

a. Perkotaan, disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kg per tahunnya;
b. Pedesaan, disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kg, miskin sekali 240 kg dan paling miskin kurang dari 180 kg per tahunnya.

### 2. Faktor Kemiskinan

Jika dilihat dari aspek ekonomi, menurut Kuncoro yang mengutip Sharp (1996), kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

a. Pada tingkat mikro, kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata;
b. Kualitas sumber daya manusia;

c. Perbedaan dalam akses terhadap modal.

Menurut Ginandjar, beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan kerja dan kondisi isolasi. Namun menurut laporan Bank Dunia, terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta infrastruktur dan letak geografis. (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Letak geografis berhubungan dengan kemiskinan karena dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kondisi alam, yang dapat diukur dari segi kesuburan tanah dan potensi sumber daya alam. Kedua, kesenjangan pembangunan baik pembangunan pedesaan maupun perkotaan dan pembangunan antarprovinsi di Indonesia. Selain itu, ada dimensi lain dalam melihat kemiskinan, yaitu dimensi non-pendapatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap pelayanan dasar di berbagai daerah, terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini semakin memperkuat adanya perbedaan karena letak geografis. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk siklus kemiskinan. Keluarga miskin cenderung berasal dari pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Akibat produktivitas yang rendah, pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Akibatnya, keluarga miskin melahirkan generasi miskin di masa depan (Fitriana & Qibthiyyah, 2021).

## 3. Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Orde Lama

Pemerintah telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Indonesia sejak era orde lama yaitu pada tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Nasional (Penasbede) delapan tahun. Berdasarkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, tentang pedoman model pembangunan nasional semesta terencana tahap pertama tahun 1961-1969, maka model pembangunan handotersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pada masa itu, pembangunan difokuskan pada peningkatan pendapatan nasional yang dapat membentuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kekayaan dicapai melalui berbagai kebijakan yang meningkatkan pendapatan secara mandiri, seperti pendidikan, perumahan dan perawatan kesehatan, yang mendapat perhatian khusus dari negara. Kemudian kebijakan peningkatan pendapatan nasional dan keluarga dilanjutkan. Program peningkatan kualitas penduduk sepenuhnya tercakup dalam rencana pembangunan delapan tahunan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Kebijakan pemerintah saat itu, mejelaskan peningkatan kualitas masyarakat dengan mengatasi kemiskinan adalah tujuan utama. Namun dalam praktiknya, pembangunan terhenti akibat krisis politik 1965. Krisis politik saat itu malah menambah jumlah penduduk miskin. (R, 2018).

## 4. Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Orde Baru

### a. Tahun 1974 – 1988

Rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang dijalankan oleh pemerintah, terutama Repelita I-IV, dilaksanakan melalui program sektoral dan regional. Program sektoral adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach) seperti pakaian, makanan, dan kesehatan. Sementara itu, program regional bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan sumber daya manusia,

terutama di daerah (Saryana, 2020). Untuk memudahkan pemahaman tentang pelaksanaan program sektoral dan regional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program sektoral adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian sasaran pembangunan di bidang tertentu. Pembangunan ini terjadi di daerah-daerah yang merespon kondisi dan potensi tersebut. Biaya program ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh berbagai instansi dan lembaga pemerintah.
2. Program lokal adalah program yang menitikberatkan pada kepentingan daerah untuk pemersatu dan percepatan pembangunan daerah. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengurangi kemiskinan di daerah sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat (Rosyadi & Tobirin, 2010).

Program Inpres memiliki beberapa tujuan diantara yang lain: (1) Kesetaraan pembangunan, (2) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi perbedaan suku bunga pembangunan antardaerah, (3) meningkatkan kemampuan pejabat pemerintah daerah dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemungkinan lokal dan kapasitas masyarakat lokal tetapi konsisten dengan program pembangunan nasional, (4) sebagai proses lebih lanjut dengan prinsip bantu (Sumiar, 2019).

**b. Tahun 1988 – 1998**

Kemudian periode 1988-1998 yaitu Ditolak V-VI pda oleh Pemerintah menerapkan program respons dengan strategi khusus untuk memecahkan masalah perbedaan sosial-ekonomi. cara yang dikembangkan program yang terpisah dan sinergis sektoral dan regional Koordinasi Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1993 untuk peningkatan penanggulangan kemiskinan akhirnya diakui melalui program IDT (Inpres Desa Tertunda) dan beberapa program lainnya. Intinya saat ini adalah program yang dijalankan meningkatkan program-program ini dilaksanakan sejauh ini:

1. Program penajaman selain memperbaiki program sebelum itu juga untuk percepatan pembangunan desa mencerminkan objek meningkatkan kualitas sumber sumber daya manusia di pedesaan, menciptakan struktur ekonomi lebih tahan lama, tersedia infrastruktur dan fasilitas keuangan di desa yang lebih stabil semakin banyak mengembangkan pemahaman dan kesadaran public perkembangan yang berwawasan.
2. Program IDT

   Resmi sedang berlangsung seperti yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1993. Program ini disengaja pengentasan kemiskinan dan kesenjangan keuangan. Program ini ditemukan 20.000 desa dengan dana 20 juta per tahun Program ini termasuk 3 (tiga) definisi dasar, yaitu (1) sebagai inisiator pergerakan nasional pengentasan kemiskinan, (2) sebagai strategi persediaan pengembangan dan (3) Dukungan dana bergulir perseroan paling dibutuhkan. Program ini adalah semangat kebersamaan kemajuan sebagai upaya bersama menghilangkan kemiskinan dan dapat tumbuh bersama saling memberi kesempatan berpartisipasi semaksimal mungkin terutama

pembangunan warga miskin mengharapkan kesetaraan juga bisa dibangun pengembangan melalui perbaikan potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kurikulum Kepresidenan Desa Tertinggal adalah gerakan nasional Strategi Pengurangan Kemiskinan pembangunan dan upaya yang adil perbaikan perekonomian nasional. IDT akan diperluas dan ditingkatkan berbagai program dan kegiatan sejenis yang didorong sebelumnya seperti program pembangunan Kawasan Terpadu (PKT) dan start diimplementasikan dalam Repulsed VI. Program dan Program PKT lain yang bertindak secara langsung masalah kemiskinan selanjutnya

3. Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
   Program ini merupakan dukungan untuk dan pelengkap program IDT. Program ini diterbitkan pada tahun 1995. Program tersebut menekankan 4.444 dukungan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar yang secara langsung mendukung 4.444 kegiatan sosial ekonomi di 4.444 komunitas lokal. Program ini akan dilaksanakan dengan tujuan jangka panjang pemberdayaan masyarakat (Sumiar, Front Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2019).

**c. Tahun 1998 – 2007**

Program yang dilaksanakan hari ini adalah program untuk pengentasan kemiskinan selama dan setelah krisis ekonomi 1997/1998. Menurut perhitungan BPS, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta orang (24,2%) 1998. Pemerintah berhasil memperbaiki kondisi ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan pelayanan dan meningkatkan penjualan masyarakat, yaitu seluruh penduduk orang miskin berangsur-angsur berkurang awalnya 49,5 juta orang (24,2%) 1998 menjadi 36,1 juta orang (16,6%) pada tahun 2004. Dari jumlah penduduk miskin 11,5 juta orang tinggal di sana (12,6%) perkotaan dan 24,6 juta orang (19,5%) ada di dalam negeri. Selain itu, pemerintah telah Keputusan Presiden nomor 124 tahun tahun 2001 sebuah Komite Tanggapan dibentuk Kemiskinan (KPK), forum antar pelaku dalam manajemen koordinasi perencanaan, pelatihan, pemantauan dan pelaporan semua tindakan pengentasan kemiskinan untuk mempertajam eksistensi panitia pengentasan kemiskinan diakses 10 September 2005 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan Kelompok Koordinasi Respons Kemiskinan (TKPK) (Handoyo, Anas, & Yudianto, 2019).

**d. Masa Joko Widodo dan Jusuf Kalla**

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintahan Jusuf Kalla memutuskan menyalin strategi kemiskinan ini meliputi (Barika, Ekaputri, Septriani, & Efendi, 2021):

(1) Program perlindungan tetap sosial;
(2) Meningkatkan Akses Perawatan utama;
(3) Otorisasi kelompok masyarakat miskin; dan
(4) Merancang pembangunan inklusif

Dalam keputusan presiden disebutkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah, pembentukan program perlindungan sosial ini termasuk:

(1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
(2) Program Indonesia Pintar;

(3) Program Indonesia Sehat.

**SIMPULAN**

Adanya kebijakan dari pemerintah memang sangat berkaitan dengan strategi pengentasan masalah sosial kemiskinan. Melalui program yang diusung sebenarnya sudah bekerja dengan baik dengan mengusung program-program terbaru di tiap periode pemimpinnya. Hal ini sudah di tulis secara resmi ke dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengentasan kemiskinan di mulai dari orde lama sampai kepimpimpinan Joko Widodo ini dilakukan sesuai dengan visi misi yang ada di dalam UUD 1945 dan berdasarkan Pancasila sehingga kebijakan yang dilaksanakan berusaha untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Barika, Ekaputri, R. A., Septriani, & Efendi. (2021). Analisis Struktur Ekonomi Di Sumatera. *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan PublikVolume 4 Nomor 2*.

Fitriana, N. E., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskis Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*.

Handoyo, S., Anas, S., & Yudianto, I. (2019). Analysis of the Financial Condition West Java Provincial Government, Indonesia.

Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan* , 73-96.

R, F. F. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 66-79.

Rosyadi, S., & Tobirin. (2010). Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan. 115-125.

Sabani, I. A. (2018). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendidikan Boarding School SMK Negeri 3 Di Kabupaten Purbalingga.

Saryana. (2020). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sumiar, H. R. (2019). Back Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).

Sumiar, H. R. (2019). Front Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).

**Copyright holder:**
Imam Setiawan, Jamaliah **(2023)**
**First publication right:**
ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik